

BAB I

PENDAHULUAN

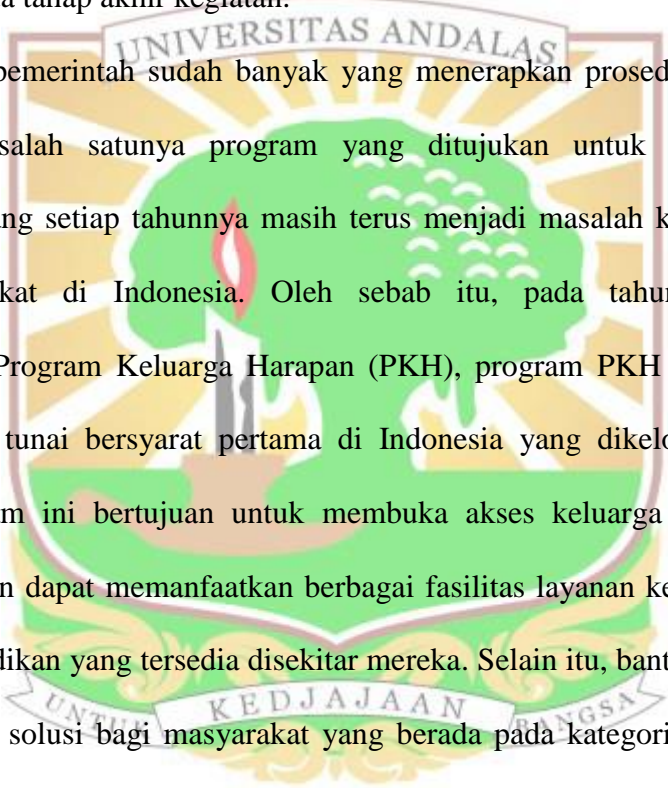
1.1 Latar belakang

Kegiatan dari pemerintah yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat memerlukan adanya kejelasan dari beberapa aspek. Mulai dari aspek perencanaan prosedur kegiatan, yaitu keselarasan antara kegiatan yang telah dirancang oleh pemerintah dengan kegiatan yang berjalan di lapangan. Sehingga diharapkan kegiatan yang dirancang pemerintah dapat memperoleh hasil dan tujuan yang baik dari kegiatan tersebut. Setiap kegiatan yang berjalan memerlukan suatu sistem yang berfungsi sebagai sarana untuk mengatur jalannya prosedur kegiatan. Selain memberikan kemudahan dalam segi mekanisme, peranan prosedur diharapkan memberikan pengaruh yang baik terhadap kinerja pada instansi, prosedur yang baik akan memberi dampak kinerja yang lebih teratur, karena jalannya prosedur sudah sesuai arahan yang telah diberikan dan berjalan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan,

Prosedur administrasi merupakan salah satu tahapan sistem yang berperan melakukan penataan dalam setiap tahap kegiatan yang berfungsi mengatur tata kelola kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Pengertian prosedur fungsinya sebagai alat yang mengatur cara kerja suatu pekerjaan yang berkaitan dengan sistem kerja dan waktu yang telah ditetapkan (Rusdiana dan Zaqiah,2014). Sedangkan Menurut Siagian (2004), pengertian administrasi adalah keseluruhan proses yang dikerjakan antara dua manusia atau lebih dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan hakikat penggunaan prosedur administrasi memiliki cakupan yang cukup luas, diantaranya membuat suatu kebijaksanaan, merencanakan, memutuskan, mengarahkan, membimbing, serta menyelaraskan setiap

bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam membuat prosedur administrasi, dengan tujuan yang diinginkan dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Pada umumnya tujuan pemerintah menggunakan prosedur administrasi pada setiap program yang dilaksanakan, agar setiap bidang kegiatan memiliki tahapan wewenang yang jelas. Selain itu, tujuan prosedur administrasi sebagai sistem akan mempermudah dalam mengatur mekanisme kegiatan. Keberhasilan suatu kegiatan juga akan terlihat melalui kebijakan prosedur administrasi yang sudah dikerjakan pada tahap akhir kegiatan.



Program pemerintah sudah banyak yang menerapkan prosedur administrasi pada kegiatannya, salah satunya program yang ditujukan untuk menangani masalah kemiskinan yang setiap tahunnya masih terus menjadi masalah krusial yang dihadapi oleh masyarakat di Indonesia. Oleh sebab itu, pada tahun 2007 pemerintah meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH), program PKH merupakan program bantuan dana tunai bersyarat pertama di Indonesia yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Program ini bertujuan untuk membuka akses keluarga yang berada dalam kategori miskin dapat memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas layanan pendidikan yang tersedia disekitar mereka. Selain itu, bantuan PKH diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang berada pada kategori miskin untuk dapat meningkatkan perekonomian melalui pemanfaatan modal agar memperoleh pendapatan rumah tangga yang lebih baik.

Dalam pelaksanaannya, PKH merupakan program yang dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dibawah arahan Presiden. Program arahan dari Kemensos bekerjasama dengan Dinas Sosial yang merupakan instansi pemerintah yang bertugas untuk mengelola jenis bantuan sosial pada tiap-tiap daerah. Diharapkan program PKH dapat berjalan dengan maksimal dalam memberikan bantuan tepat sasaran kepada

masyarakat yang berhak menerima bantuan berdasarkan perolehan Basis Data Terpadu (BDT) yang dikeluarkan oleh Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) di pusat. Oleh sebab itu, peranan Dinas Sosial pada masing-masing daerah memiliki pengaruh besar untuk menjangkau dan memberikan informasi yang diperlukan terkait masyarakat miskin yang layak menerima bantuan sosial berupa PKH.

Salah satunya Dinas Sosial Kota Pariaman yang telah melakukan pembagian bantuan sosial berupa PKH yaitu sejak tahun 2013 hingga kini. Dari wawancara awal dengan beberapa masyarakat terkait alur bantuan sosial berupa PKH ternyata tidak selalu berjalan mulus. Terdapat beberapa kendala pada Prosedur Administrasi sebagai calon penerima bantuan sosial PKH di Kota Pariaman, ketika masyarakat mendaftarkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial menurut alur pendaftaran, masyarakat harus masuk kedalam pengusulan DTKS yang dilakukan oleh RT/RW/Kepala Dusun yang memiliki wewenang untuk mengusulkan masyarakat sesuai dengan alamat domisili yang tertera di KTP, namun masyarakat mengeluhkan mengenai aturan masyarakat miskin yang seharusnya layak untuk menerima bantuan sosial PKH, karena beberapa masyarakat yang telah mendaftar tidak dapat menerima bantuan karena tidak lolos pada tahap verifikasi data. Sehingga muncul beberapa keluhan dari masyarakat mengenai bagaimana prosedur administrasi yang sesuai untuk bisa mendapat bantuan PKH dan apa saja kendala yang mengakibatkan masyarakat tidak lolos validasi data, Hal tersebut memberikan perhatian khusus pada prosedur administrasi yang diberikan oleh Dinas Sosial sebagai petunjuk pelaksanaan PKH yang ada di Kota Pariaman.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin membahas lebih lanjut mengenai .
“Prosedur Administrasi Penerima Bantuan Sosial Berupa Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Kantor Dinas Sosial Kota Pariaman“.

1.2 Perumusan Masalah

Sebagai judul dan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana prosedur administrasi sebagai penerima bantuan PKH yang berjalan pada kantor Dinas Sosial di Kota Pariaman?
- 2) Apa saja kendala mendaftar sebagai penerima bantuan sosial berupa PKH Di Kota Pariaman ?
- 3) Bagaimana solusi yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Pariaman ?
- 4) Bagaimana kepuasan masyarakat dengan kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pariaman ?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan yang akan dilaksanakan berdasarkan rumusan masalah di atas, antara lain :

1. untuk mengetahui bentuk prosedur administrasi sebagai penerima bantuan sosial berupa PKH di Kota Pariaman
2. untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala masyarakat memperoleh bantuan sosial berupa PKH di kota pariaman
3. untuk mengetahui solusi yang telah diberikan Dinas Sosial Kota Pariaman dalam mengatasi kendala pembagian PKH
4. untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan Dinas Sosial Kota Pariaman

1.4 Manfaat Magang

Manfaat kegiatan magang ini adalah :

1. Memahami bagaimana prosedur administrasi pembagian bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH) di Dinas Sosial Kota Pariaman.

2. Mendapatkan pengetahuan secara aplikatif yang bisa didapatkan dengan cara turun langsung untuk melihat proses pembagian bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH) di Dinas Sosial Kota Pariaman.
3. Memberikan hasil laporan yang diperoleh selama magang sebagai pedoman Dinas Sosial Kota Pariaman untuk meningkatkan kualitas prosedur administrasi penerimaan bantuan PKH, dan memberikan pelayanan yang terbaik dimasa yang akan datang.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Penulis melakukan metode pengumpulan data (informasi dan keterangan) yang diperoleh melalui berbagai cara sebagai berikut :

- a. Metode ke lapangan (field research) penulis melakukan penelitian langsung ke objek penelitian seperti melakukan observasi dan tanya jawab pada salah satu penerima bantuan.
- b. Penelitian kepustakaan (library research) penulis mengambil data dengan cara membaca berbagai literature (buku buku dengan segala informasi relevan) dan jurnal yang berhubungan dengan penelitian.
- c. Survey yang dilakukan dengan membagikan kuisioner kepada masyarakat terkait kepuasan pelayanan di Kantor Dinas Sosial Kota Pariaman

1.6 Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan magang ini dilakukan di Dinas Sosial Kota Pariaman selama 53 hari kerja dimulai dari tanggal 29 Oktober 2021- 20 Desember 2021.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika laporan penulisan laporan magang terdiri atas lima bab yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, tempat dan waktu magang, serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Beri tentang penjelasan teori tinjauan pustaka yang membahas teori-teori yang meliputi pengertian Administrasi, tujuan Administrasi, manfaat Administrasi, pengertian PKH, tujuan PKH, penerima PKH.

BAB III : GAMBARAN UMUM KANTOR DINAS SOSIAL KOTA PARIAMAN

Memaparkan mengenai gambaran umum kantor Dinas Sosial Kota Pariaman.

BAB IV : PEMBAHASAN

Menguraikan tentang prosedur administrasi pembagian bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH) serta perkembangan pembagian PKH di Kota Pariaman.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan serta saran untuk Dinas Sosial Kota Pariaman yang mungkin berguna untuk memecahkan permasalahan yang akan dihadapi.

